



**Hara ngākau kino**

**Kejahatan kebencian**

---

**Ringkasan Dokumen  
Konsultasi**

## TENTANG DOKUMEN INI

Ini adalah ringkasan Dokumen Konsultasi untuk tinjauan Te Aka Matua o te Ture | Law Commission terhadap hukum kejahatan kebencian. Ringkasan ini memberikan informasi tentang hukum tentang kejahatan kebencian dan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang akan kami pertimbangkan dalam tinjauan kami.

## MEMBUAT PENGAJUAN

Kami ingin mendengar pandangan Anda. Umpan balik Anda akan membantu kami membuat rekomendasi kepada Pemerintah tentang hukum mengenai kejahatan kebencian. Anda dapat mengemukakan pendapat Anda dengan mengirimkan pengajuan kepada kami. Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan dalam ringkasan ini. Pengajuan ditutup pada pukul 17.00 tanggal 13 Maret 2025.

Anda dapat membuat pengajuan dengan:

- Mengisi formulir pengajuan di situs web kami: <https://www.lawcom.govt.nz/our-work/hate-crime>;
- mengirim email ke [hate.crime@lawcom.govt.nz](mailto:hate.crime@lawcom.govt.nz); atau
- mengirim surat ke: Hate crime, Law Commission, PO Box 2590, Wellington 6140.

Jika opsi ini tidak dapat diakses oleh Anda atau Anda memerlukan bantuan untuk membuat pengajuan, silakan hubungi kami dengan:

- mengirim email ke [hate.crime@lawcom.govt.nz](mailto:hate.crime@lawcom.govt.nz);
- menelepon nomor 0800 832 526; atau
- menggunakan Layanan Relai Selandia Baru jika Anda penyandang tunarungu, memiliki masalah pendengaran, tunanetra, tunawicara, atau jika Anda mengalami kesulitan untuk berbicara. Situs web Layanan Relai di sini: <https://www.nzrelay.co.nz/index>.

Membuat pengajuan mungkin membuat beberapa orang merasa emosional atau tertekan. Jika ingin mengirimkan pengajuan, Anda mungkin perlu memastikan adanya orang yang siap membantu. Jika merasa sedih atau tertekan, Anda juga dapat menelepon atau mengirim SMS ke 1737. Ini adalah layanan bantuan gratis

yang tersedia 24 jam sehari. Anda akan dapat berbicara atau bertukar pesan dengan konselor terlatih. Layanan ini disediakan oleh Whakarongorau Aotearoa | Layanan Telehealth Selandia Baru.

## **BAGAIMANA PENGAJUAN ANDA DITINDAKLANJUTI?**

Jika Anda mengirimkan pengajuan kepada kami, kami akan:

- mempertimbangkan pengajuan tersebut dalam tinjauan kami; dan
- menyimpan pengajuan tersebut sebagai bagian dari catatan resmi kami.

Kami juga dapat:

- merujuk pada pengajuan Anda dalam publikasi kami;
- memuat pengajuan Anda di situs web kami; dan
- menggunakan pengajuan Anda untuk menginformasikan pekerjaan kami dalam tinjauan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di sini:

<https://www.lawcom.govt.nz/have-your-say/making-a-submission/>.

## **Penerbitan pengajuan di situs web kami atau dalam publikasi kami**

Anda dapat meminta agar kami tidak menampilkan nama Anda atau informasi pengidentifikasi lainnya dalam pengajuan Anda. Anda juga dapat meminta agar kami tidak menampilkan bagian lain dari pengajuan Anda (misalnya, informasi yang bersifat sensitif dan pribadi tentang Anda).

Jika Anda memintanya, kami tidak akan menampilkan detail atau bagian dari pengajuan Anda di situs web kami atau dalam publikasi kami. Jika Anda *tidak* mengajukan permintaan semacam ini, kami mungkin menampilkan seluruh atau sebagian pengajuan Anda.

## **Permintaan informasi resmi**

Informasi yang dimiliki oleh Law Commission tunduk pada Undang-Undang Informasi Resmi 1982. Jika kami menerima permintaan informasi yang mencakup pengajuan Anda, kami harus mempertimbangkan untuk merilisnya. Saat mengevaluasi apakah kami diharuskan merilis pengajuan Anda, kami akan mempertimbangkan permintaan apa pun yang Anda ajukan agar kami tidak menampilkan informasi di situs web kami

atau di publikasi kami dan alasan apa pun yang Anda berikan untuk permintaan tersebut. Kami juga akan mencoba berkonsultasi dengan Anda.

### **Undang-Undang Privasi 2020**

Informasi yang diberikan kepada Law Commission tunduk pada Undang-Undang Privasi 2020. Pengajuan Anda mungkin berisi informasi pribadi. Anda memiliki hak untuk mengakses dan mengoreksi informasi pribadi Anda.

## TINJAUAN KAMI (BAB 1)

1. Law Commission sedang meninjau hukum tentang kejahatan kebencian di Aotearoa Selandia Baru. 'Kejahatan kebencian' berarti perilaku yang:
  - sudah termasuk tindak pidana berdasarkan hukum Selandia Baru; dan
  - dilakukan karena alasan kebencian atau permusuhan terhadap sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik (misalnya, ras, warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, atau disabilitas).
2. Di bawah hukum yang berlaku saat ini, motif kebencian pelaku kejahatan diperhitungkan ketika mereka dijatuhi hukuman. Royal Commission of Inquiry atas serangan teroris terhadap mesjid (tempat ibadah Muslim) di Christchurch pada tanggal 15 Maret 2019 merekomendasikan untuk membuat delik kejahatan kebencian baru. Tinjauan ini mempertimbangkan apakah ada masalah dalam hukum yang berlaku saat ini dan, jika ada, bagaimana membuat hukum tersebut menjadi lebih baik. Hal ini dapat mencakup pembuatan delik kejahatan kebencian baru, seperti yang direkomendasikan oleh Royal Commission. Tinjauan ini tidak mempertimbangkan ujaran kebencian.
3. Tujuan Dokumen Konsultasi dan dokumen ringkasan ini adalah untuk mendengarkan pendapat publik. Pengajuan yang kami terima akan membantu kami mengembangkan proposal reformasi. Dalam tinjauan ini, kami berencana untuk berdiskusi dengan para ahli mengenai kemungkinan penerapan perubahan yang diusulkan terhadap hukum tersebut. Kami berencana untuk melapor kepada Menteri Kehakiman pada pertengahan tahun 2026.

## KEJAHATAN KEBENCIAN DAN DAMPAKNYA (BAB 2)

4. Kejahatan kebencian berfokus pada identitas korban. Beberapa orang mengatakan bahwa fokus pada identitas ini menyebabkan kerusakan mental lebih lanjut—baik bagi korban maupun anggota masyarakat yang terdampak yang mungkin juga merasa terancam atau menjadi sasaran. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan kebencian juga menyebabkan kerugian pada masyarakat yang lebih luas dengan membuat orang merasa kurang terhubung satu sama lain.

5. Kami belum tahu banyak tentang kejahatan kebencian di Aotearoa Selandia Baru. Sejak 2019, Ngā Pirihimana o Aotearoa | Kepolisian Selandia Baru telah mengumpulkan data tentang delik yang dilaporkan yang diyakini oleh korban atau orang lain bermotif kebencian. Pada tahun 2023, terdapat 5.019 kejahatan kebencian yang dilaporkan (0,9 persen dari semua delik yang dilaporkan). Delik yang umum terjadi adalah pelecehan, delik ketertiban umum (seperti perilaku tidak tertib), tindakan yang ditujukan untuk menyebabkan cedera, dan kerusakan properti. Karakteristik yang paling sering menjadi sasaran adalah ras atau etnis, disusul oleh orientasi seksual, agama, dan identitas gender. Sejak tahun 2021, 14-18 persen kejahatan kebencian yang dilaporkan telah diselidiki hingga terdapat cukup bukti untuk mendakwa seseorang dengan delik dan Polisi memutuskan untuk mengambil tindakan. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya telah dituntut.

**Pertanyaan 1: Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami mengenai kejahatan kebencian yang terjadi di Aotearoa Selandia Baru dan dampaknya?**

### **PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN UTAMA REFORMASI (BAB 3)**

6. Kami telah mengidentifikasi beberapa pertimbangan utama yang akan membantu kami memikirkan apakah reformasi hukum diperlukan. Pertimbangan-pertimbangan ini juga akan membantu kami menilai berbagai opsi reformasi.

#### **Perlunya memperlakukan kejahatan kebencian secara lebih serius daripada kejahatan lainnya**

7. Undang-undang kejahatan kebencian memperlakukan kejahatan kebencian secara lebih serius daripada delik lainnya. Alasan-alasan ini relevan dengan apakah reformasi hukum diperlukan. Mungkin hukum kita tidak memperlakukan kejahatan kebencian dengan cukup serius.
8. Ada empat alasan yang biasanya diberikan mengenai alasan mengapa kejahatan kebencian harus ditangani secara lebih serius daripada delik lainnya:

- kejahatan kebencian menyebabkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan lainnya;
- pelaku kejahatan kebencian lebih dapat dipersalahkan daripada pelaku kejahatan lainnya;
- hukum harus mengirimkan pesan bahwa kejahatan kebencian adalah kesalahan yang serius; dan
- menghukum kejahatan kebencian dengan lebih berat akan berarti lebih sedikit orang yang melakukan kejahatan kebencian (meskipun ada bukti bahwa hukuman yang lebih berat tidak menghentikan orang untuk melakukan kejahatan).

### Kapan waktu yang tepat untuk membuat delik kejahatan baru?

9. Tinjauan ini melihat perlunya menciptakan delik kejahatan kebencian baru. Panduan pemerintah menyatakan bahwa delik pidana hanya boleh dibuat jika ada alasan yang kuat. Perilaku yang sudah merupakan suatu delik seharusnya hanya dikriminalkan lebih lanjut jika hal tersebut akan memberikan tujuan tambahan yang tidak dapat dicapai oleh hukum yang berlaku saat ini. Hukuman pidana dapat berdampak serius pada individu dan menimbulkan biaya yang signifikan bagi negara.

### Ngā tikanga

10. Law Commission harus memperhatikan te ao Māori (dunia Māori) ketika membuat rekomendasi. Hal ini termasuk tikanga, sistem nilai dan prinsip yang mengatur hubungan dalam te ao Māori. Memikirkan tikanga merupakan bagian yang kokoh dalam pembuatan hukum yang baik di Aotearoa Selandia Baru.
11. Penelitian kami menunjukkan bahwa tikanga tidak memiliki konsep yang setara dengan kejahatan kebencian. Namun, kami telah mempertimbangkan kesamaan antara kejahatan kebencian dan konsep tikanga, yaitu hara, kanga, dan kōruhu.
  - Hara telah digambarkan sebagai tindakan yang melanggar keadilan atau hukum.
  - Kanga dan kōruhu merupakan hara yang serius. Kanga telah digambarkan sebagai pelecehan verbal, termasuk mengutuk

seseorang. Kōruhu digambarkan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian tanpa rasa penyesalan atau tanpa alasan yang kuat.

12. Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa kejahatan kebencian akan dianggap sebagai kejahatan serius di bawah tikanga.

### Te Tiriti o Waitangi | Perjanjian Waitangi

13. Perjanjian Waitangi adalah dasar pemerintahan di Aotearoa Selandia Baru dan harus dipertimbangkan saat mempertimbangkan untuk mengubah hukum. Bagi kami, tantangannya adalah bagaimana memberikan efek pada kewajiban perjanjian Pemerintah dalam ruang lingkup tinjauan ini, yang hanya melihat pada hukum kejahatan kebencian. Kami menyambut baik pandangan Anda mengenai masalah ini.
14. Sebagai contoh, salah satu kewajiban Pemerintah adalah melindungi penerapan tino rangatiratanga. Hal ini mewajibkan Pemerintah untuk mengizinkan Māori mengelola urusan mereka sendiri dengan cara yang sesuai untuk mereka. Mungkin ada cara untuk lebih melibatkan komunitas Māori dalam merespons kejahatan kebencian. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatasi kesenjangan antara suku Māori dan warga Selandia Baru lainnya. Masyarakat Māori terwakili secara berlebihan di semua tingkat sistem peradilan pidana, termasuk sebagai tersangka pelaku kejahatan kebencian. Risiko kriminalisasi berlebihan dapat mengarah pada tidak diberlakukannya delik kejahatan kebencian spesifik.

### Kewajiban hak asasi manusia

15. Reformasi hukum harus konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia Aotearoa Selandia Baru.
16. Beberapa orang berpikir bahwa hukum kejahatan kebencian diperlukan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional. Hukum kami kemungkinan besar sudah memenuhi kewajiban ini, karena mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan motif kebencian saat menjatuhkan hukuman.

17. Sebagian orang lainnya mengatakan bahwa hukum kejahatan kebencian melanggar hak asasi manusia, termasuk hak akan:
- kebebasan berpikir (karena hukum kejahatan kebencian menghukum motif dan keyakinan pelaku);
  - kebebasan berekspresi dan berserikat (karena hal-hal yang dikatakan pelaku atau pergaulan mereka dengan orang lain dapat digunakan untuk membuktikan motif kebencian dan memperberat hukuman mereka); dan
  - kesetaraan (karena korban dan pelaku kejahatan kebencian diperlakukan secara berbeda dengan korban dan pelaku kejahatan lainnya).
18. Hak-hak ini dapat dibatasi jika ada alasan yang kuat. Te Kōti Pīra | Pengadilan Banding mengatakan bahwa batasan yang diberikan pada hak kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh hukum kejahatan kebencian di Aotearoa Selandia Baru dapat dijustifikasi, mengingat tujuan penting hukum kejahatan kebencian.

### **Karakteristik apa yang harus dilindungi oleh hukum kejahatan kebencian?**

19. Kami sedang mempertimbangkan karakteristik apa saja yang harus dilindungi oleh hukum kejahatan kebencian di Selandia Baru. Hal ini akan membantu kami memutuskan apakah akan membuat perubahan pada hukum dan seperti apa perubahannya.
20. Kamu perlu memikirkan tentang:
- seberapa serius sekelompok orang terpengaruh oleh kejahatan kebencian;
  - jenis permusuhan apa yang ada terhadap kelompok tersebut; dan
  - apakah hukum kejahatan kebencian merupakan cara terbaik untuk mengatasi delik tersebut.
21. Di luar negeri, terdapat perdebatan mengenai apakah beberapa karakteristik, seperti jenis kelamin, gender, dan usia, harus dicakup. Misalnya, ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai apakah hukum kejahatan kebencian

merupakan cara terbaik untuk menanggapi kekhawatiran akan menyinggung perasaan perempuan dan orang lanjut usia.

22. Di bawah hukum yang berlaku saat ini, setiap "karakteristik umum yang melekat" dilindungi. Jika berpikir bahwa pendekatan baru, seperti delik kejahatan kebencian spesifik, harus diberlakukan di Aotearoa Selandia Baru, kami perlu memutuskan karakteristik apa yang harus dilindungi. Delik kejahatan kebencian hanya melindungi karakteristik spesifik.
23. Dalam ringkasan selanjutnya, sebut karakteristik yang tercakup dalam undang-undang kejahatan kebencian sebagai 'karakteristik yang dilindungi'.

**Pertanyaan 2: Bagaimana kami dapat sebaik mungkin memenuhi kewajiban Pemerintah berdasarkan Te Tiriti o Waitangi | Perjanjian Waitangi dalam tinjauan ini?**

**Pertanyaan 3: Karakteristik apa yang harus dilindungi oleh hukum terkait kejahatan kebencian? Mengapa?**

**Pertanyaan 4: Apa pendapat Anda tentang pertimbangan utama reformasi yang telah kami identifikasi untuk tinjauan ini?**

## **BAGAIMANA KEJAHATAN KEBENCIAN DITANGANI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI? (BAB 4)**

### **Hukum saat ini**

24. Di bawah hukum yang berlaku saat ini, pengadilan mempertimbangkan motif kebencian ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Undang-Undang Penjatuhan Hukuman mengatakan bahwa pengadilan yang menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan motif kebencian jika:

... pelaku melakukan delik sebagian atau seluruhnya karena permusuhan terhadap sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang melekat tetap seperti ras, warna kulit, kebangsaan, agama, identitas gender, orientasi seksual, usia, atau disabilitas; dan

- (i) permusuhan tersebut disebabkan oleh karakteristik yang sama; dan
- (ii) pelaku percaya bahwa korban memiliki karakteristik tersebut: ...

25. Motif kebencian adalah 'faktor yang memberatkan'. Artinya, hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat, tetapi tidak menambah hukuman maksimum untuk delik tersebut. Hal ini dapat berlaku untuk delik apa pun.
26. Faktor yang memberatkan kejahatan kebencian adalah salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Faktor-faktor lain yang memberatkan termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan atau penggunaan senjata, kekejaman tertentu ketika melakukan delik, dan kerentanan korban (misalnya, karena usia atau kesehatan mereka).

### Mengenali, mencatat, dan menyelidiki kejahatan kebencian

27. Sebagaimana disebutkan di atas, Polisi sekarang mencatat kejahatan kebencian yang dilaporkan. Mereka juga telah membuat panduan dan pelatihan untuk petugas polisi tentang cara mengenali, mencatat, dan menyelidiki kejahatan kebencian. Setelah kejahatan kebencian yang dilaporkan diselidiki, Polisi akan memutuskan bagaimana menanggapi. Terkadang, tidak ada cukup bukti untuk menuntut delik tersebut. Terkadang alternatif lain, seperti peringatan, mungkin lebih tepat.

### Menuntut kejahatan kebencian

28. Keputusan untuk menuntut seseorang atas suatu delik dilakukan oleh jaksa penuntut. Sebagian besar kejahatan kebencian dituntut oleh jaksa penuntut Kepolisian. Kejahatan kebencian yang lebih serius dituntut oleh pengacara Pemerintah. Delik hanya akan dituntut jika ada cukup bukti dan kepentingan umum mewajibkan penuntutan. Faktor-faktor yang memberatkan (seperti motif kebencian pelaku) dapat dipertimbangkan ketika memutuskan apakah kepentingan umum memerlukan penuntutan.
29. Jaksa penuntut mengandalkan petugas polisi untuk memberikan bukti motif kebencian. Motif kebencian mungkin tidak akan diangkat pada saat penjatuhan hukuman jika tidak ada cukup bukti.

### Menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan kebencian

30. Jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan harus mempertimbangkan motif kebencian sebagai faktor yang memberatkan saat

menjatuhkan hukuman. Terkadang, pengadilan akan memutuskan suatu delik bermotif kebencian dengan melihat bukti-bukti dari persidangan atau fakta-fakta yang disetujui oleh jaksa penuntut dan terdakwa. Jika terdakwa dan jaksa tidak sepakat mengenai apa yang terjadi, jaksa mungkin perlu menghadirkan bukti-bukti lebih lanjut.

31. Pengadilan telah menafsirkan faktor yang memberatkan kejahatan kebencian secara luas. Ini biasanya akan berlaku jika pelaku menunjukkan permusuhan terhadap korban berdasarkan karakteristik yang sama. Misalnya, pengadilan telah menerapkan faktor yang memberatkan tindak pidana kebencian di mana pelaku membuat komentar rasis atau homofobia kepada korban selama melakukan delik.
32. Dalam putusan pengadilan yang kami temukan, ras, warna kulit, atau kewarganegaraan merupakan alasan yang paling umum untuk menerapkan faktor yang memberatkan. Sejumlah keputusan tersebut mencakup berbagai macam delik, termasuk pembunuhan, penyerangan, intimidasi, kepemilikan dan penggunaan bahan peledak, perampokan dan perampokan, mendistribusikan publikasi yang tidak pantas, kejahatan seksual, dan aksi terorisme.

### Rehabilitasi pelaku kejahatan kebencian

33. Ara Poutama Aotearoa | Departemen Pemasyarakatan menyediakan program rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Program-program ini mencoba mengubah sikap dan perilaku yang menyebabkan delik. Program-program ini biasanya hanya diberikan bagi pelaku kejahatan yang dinilai memiliki risiko menengah atau tinggi untuk mengulangi perbuatannya. Pelaku kejahatan juga dapat berkonsultasi dengan psikolog secara individu jika kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi melalui program kelompok.
34. Tidak ada program rehabilitasi khusus untuk pelaku kejahatan kebencian. Departemen Pemasyarakatan mengatakan kepada kami bahwa sepertinya tidak akan ada cukup banyak pelaku yang menjalani hukuman atas kejahatan kebencian yang dapat dikelompokkan bersama dengan aman. Mereka juga mengatakan bahwa program-program yang sudah ada dan pembinaan individu mungkin efektif untuk pelaku kejahatan kebencian.

35. Jika Departemen Pemasyarakatan mengetahui bahwa delik yang dilakukan seseorang bermotif kebencian, hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan program atau pembinaan individual. Namun, Departemen Pemasyarakatan tidak selalu diberi tahu apakah pelaku telah melakukan kejahatan kebencian. Bagi pelaku yang memiliki risiko menengah atau tinggi untuk mengulangi perbuatannya, Departemen Pemasyarakatan membaca catatan hukuman pengadilan, yang mungkin merujuk pada motif kebencian.

## APAKAH ADA MASALAH DENGAN HUKUM SAAT INI? (BAB 5)

### Menunjukkan bahwa kejahatan kebencian bersifat serius

36. Beberapa orang berpikir bahwa hukum harus menyampaikan pesan bahwa kejahatan kebencian adalah sebuah kesalahan yang serius. Di bawah hukum yang berlaku saat ini, hal ini dapat terjadi karena:
- hakim mengatakan bahwa suatu delik termasuk dalam kejahatan kebencian dalam sidang pengadilan atau dalam keputusan hukuman tertulis;
  - media yang memberitakan tentang kejahatan kebencian; atau
  - pelakunya menerima hukuman yang lebih berat.
37. Namun, beberapa orang mungkin berpikir bahwa hukum yang ada saat ini tidak cukup untuk memberi tahu masyarakat tentang kejahatan kebencian dan keseriusannya. Ini karena:
- motif kebencian bukanlah bagian dari delik yang dituduhkan kepada seseorang;
  - keputusan penjatuhan hukuman tidak harus mengatakan apakah motif kebencian dipertimbangkan atau seberapa besar hal itu mengubah hukuman;
  - pengadilan tidak perlu menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan kebencian; dan
  - hukuman maksimum untuk suatu delik adalah sama, terlepas apakah delik tersebut merupakan kejahatan kebencian ataupun bukan.

### Mendorong pelaporan kejahatan kebencian

38. Royal Commission mendapati bahwa kejahatan kebencian sering kali tidak dilaporkan kepada Polisi.
39. Ada banyak alasan mengapa seseorang tidak melaporkan kejahatan kebencian. Misalnya, delik tersebut mungkin:
  - tidak menganggap kejahatan kebencian cukup serius untuk dilaporkan ke Polisi;
  - tidak mengetahui siapa pelakunya; atau
  - memiliki pengalaman atau pandangan negatif terhadap Polisi yang membuat mereka enggan melapor.
40. Kami tertarik untuk mengetahui mengapa orang tidak melaporkan kejahatan kebencian kepada Polisi dan apakah hal ini telah membaik sejak Royal Commission menerbitkan laporannya. Setelah penyelidikan oleh Royal Commission, Polisi memperkenalkan pelatihan dan panduan yang memberi tahu petugas polisi untuk memperlakukan laporan kejahatan kebencian dengan serius.

### Memastikan motif kebencian ditangani dalam kasus-kasus yang relevan

41. Kami tertarik untuk mengetahui apakah motif kebencian diselidiki secara konsisten oleh Polisi dan dikemukakan oleh jaksa penuntut pada saat penjatuhan hukuman. Perubahan terbaru pada panduan dan pelatihan Kepolisian dapat membantu memperbaiki tanggapan terhadap kejahatan kebencian, namun mungkin masih terlalu dini untuk mengetahuinya.
42. Kami juga tertarik untuk mengetahui apakah motif kebencian harus dipertimbangkan pada tahap-tahap lain dalam proses pengadilan, seperti ketika pengadilan memutuskan apakah akan memberikan jaminan kepada terdakwa atau dalam keputusan hukuman yang berkaitan dengan pelaku yang sama.

### Mengumpulkan informasi tentang kasus kejahatan kebencian

43. Di bawah hukum yang berlaku saat ini, motif kebencian bukan merupakan bagian dari delik. Hal ini menciptakan kesulitan dalam mengumpulkan informasi

yang akurat tentang kejahatan yang dilaporkan terkait kebencian dan hasil kasus.

44. Polisi telah membuat perubahan praktis untuk memperbaiki pencatatan kejahatan kebencian yang dilaporkan dan mulai merilis informasi kepada publik. Jumlah kejahatan kebencian yang dilaporkan yang tercatat setiap tahunnya terus meningkat.
45. Masih ada kesenjangan informasi tentang apa yang terjadi pada penuntutan kejahatan kebencian (misalnya, apakah pelaku dihukum dan hukuman apa yang mereka terima) dan apakah motif kebencian diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman.

### Menerapkan faktor yang memberatkan

46. Kami telah mengidentifikasi tiga kemungkinan kekhawatiran tentang kata-kata yang digunakan dalam faktor yang memberatkan kejahatan kebencian dan penerapannya oleh pengadilan.
47. Pertama, faktor yang memberatkan berlaku jika pelaku didorong sepenuhnya *atau sebagian* oleh permusuhan. Permusuhan tidak perlu menjadi penyebab utama delik. Ini berarti faktor yang memberatkan dapat berlaku jika kebencian hanya merupakan alasan kecil dari delik tersebut. Namun, kami tidak menemukan contoh kejadian seperti itu.
48. Kedua, faktor yang memberatkan berlaku untuk menyinggung sekelompok orang yang memiliki "karakteristik umum yang melekat". Arti istilah tersebut tidak selalu jelas. Misalnya, jenis kelamin tampak sebagai "karakteristik umum yang melekat", tetapi faktor yang memberatkan jarang diterapkan pada permusuhan terhadap perempuan. Ketidakpastian tentang karakteristik mana yang harus diterapkan sebagai faktor yang memberatkan juga dapat menyebabkan keputusan yang tidak diharapkan oleh publik. Misalnya, di New South Wales, faktor yang memberatkan serupa telah digunakan untuk melindungi orang-orang yang diyakini sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
49. Ketiga, faktor yang memberatkan hanya berlaku jika pelaku meyakini bahwa korban memiliki karakteristik yang dilindungi. Misalnya, peraturan ini tidak akan

berlaku jika pelaku menulis grafiti kebencian di properti yang terbuka untuk umum tanpa mengetahui atau peduli siapa pemiliknya.

### Menilai kebutuhan rehabilitasi para pelaku kejahatan

50. Karena motif kebencian tidak tercatat dalam vonis seseorang, Royal Commission menganggap kebutuhan akan dukungan rehabilitasi bisa saja terlewatkan. Departemen Pemasarakatan mengira hal ini tidak akan menjadi masalah besar. Dukungan rehabilitasi utamanya diberikan kepada pelaku berisiko sedang dan tinggi, dan Departemen Pemasarakatan harus mengetahui apakah para pelaku ini mempunyai motif kebencian karena membaca catatan hukuman dan informasi pengadilan lainnya.
51. Namun, kebutuhan akan dukungan rehabilitasi dapat terlewatkan untuk beberapa pelaku kejahatan kebencian yang dinilai berisiko rendah. Terdapat juga kasus-kasus di mana motif kebencian pelaku tidak jelas dari catatan penjatuhan hukuman pengadilan. Hal ini dapat mempersulit Departemen Pemasarakatan untuk mengetahui bahwa seorang pelaku berisiko sedang atau tinggi memiliki motif kebencian (meskipun hal ini masih dapat diketahui dengan jelas selama penilaian dan pembinaan).

**Pertanyaan 5: Apakah Anda berpikir ada masalah dengan cara kerja hukum kejahatan kebencian saat ini di Aotearoa Selandia Baru? Jika ya, apa saja masalah tersebut?**

### IKHTISAR OPSI-OPSI REFORMASI (BAB 6)

52. Ada tiga model hukum utama yang digunakan untuk mengatasi kejahatan kebencian di luar negeri:
  - model pemberatan hukuman (saat ini digunakan di Aotearoa Selandia Baru);
  - delik kejahatan kebencian spesifik (direkomendasikan oleh Royal Commission); dan
  - model hibrida Skotlandia, yang menggabungkan aspek-aspek model pemberatan hukuman dan delik kejahatan kebencian spesifik.

53. Jika kami memutuskan bahwa ada masalah dengan hukum saat ini, hal ini dapat diatasi dengan:
- meningkatkan cara kerja model pemberatan hukuman, dengan membuat perubahan pada hukum atau praktik operasional; atau
  - mengadopsi model hukum yang berbeda.
54. Delik baru hanya boleh dibuat jika ada alasan yang kuat dan jika delik tersebut dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh hukum yang berlaku saat ini. Ini berarti mungkin lebih baik mengatasi masalah dalam hukum saat ini dengan memperbaiki model pemberatan hukuman. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, model hukum yang berbeda dapat dipertimbangkan. Kami meminta umpan balik mengenai kedua opsi tersebut di bagian akhir ringkasan ini.
55. Kami membandingkan beberapa fitur utama tiga model hukum utama dalam tabel di bawah ini.

<b>MODEL-MODEL HUKUM UNTUK MENGATASI KEJAHATAN KEBENCIAN</b>			
	<b>Pemberatan hukuman</b>	<b>Delik spesifik</b>	<b>Model hibrida Skotlandia</b>
<b>Delik apa saja yang tercakup?</b>	Semua delik	Hanya delik spesifik	Semua delik
<b>Karakteristik mana yang dilindungi?</b>	Karakteristik umum yang melekat	Hanya karakteristik spesifik	Hanya karakteristik spesifik
<b>Apakah motif kebencian dicatat sebagai bagian dari vonis?</b>	Tidak	Ya	Ya
<b>Apakah ada hukuman</b>	Tidak	Ya	Tidak

<b>maksimum yang lebih tinggi untuk kejahatan kebencian?</b>			
<b>Di mana model ini digunakan saat ini?</b>	Selandia Baru, Australia (New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan Northern Territory), Inggris dan Wales (bersama dengan delik spesifik), Kanada, Irlandia Utara	Australia (Australia Barat dan Queensland), Inggris dan Wales (bersama dengan pemberatan hukuman)	Skotlandia

## MEMPERBAIKI MODEL HUKUM SAAT INI (BAB 7)

56. Model hukum yang saat ini digunakan untuk menangani kejahatan kebencian di Aotearoa Selandia Baru disebut model pemberatan hukuman. Dalam model ini, motif kebencian pelaku kejahatan diperhitungkan sebagai faktor yang memberatkan ketika mereka dijatuhi hukuman. Motif kebencian bukan merupakan bagian dari delik, dan hukuman maksimum untuk delik tersebut tidak berubah.

### Keunggulan mempertahankan model pemberatan hukuman

57. Model pemberatan hukuman memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model hukum lainnya. Misalnya:
- ini berlaku untuk semua delik dan karakteristik umum yang melekat;
  - keseriusan motif kebencian dinilai berdasarkan kasus per kasus;
  - lebih efisien dalam hal waktu dan biaya pengadilan, karena motif kebencian tidak perlu dibuktikan di persidangan dan sering kali tidak diperdebatkan; dan

- mempertahankan model hukum yang ada saat ini akan menghindari biaya dan ketidakpastian reformasi hukum yang signifikan.

### **Cara-cara untuk memperbaiki model pemberatan hukuman**

58. Mungkin ada cara untuk memperbaiki cara kerja hukum saat ini tanpa mengubah model hukumnya. Kami ingin tahu pendapat Anda tentang hal ini. Kami menjelajahi beberapa opsi di bawah ini.

### ***Menunjukkan bahwa kejahatan kebencian bersifat serius***

59. Jika hukum yang ada saat ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa kejahatan kebencian merupakan hal yang serius, beberapa cara untuk mengatasinya dapat meliputi:

- mewajibkan hakim yang menjatuhkan hukuman untuk menyatakan bahwa suatu delik merupakan kejahatan kebencian dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan media;
- mewajibkan hakim yang menjatuhkan hukuman untuk menjelaskan bagaimana motif kebencian pelaku memengaruhi hukuman mereka;
- meninjau kembali hukuman maksimum untuk delik yang ada untuk memastikan bahwa hukuman tersebut cukup tinggi untuk mencakup motif kebencian pelaku.

### ***Mendorong pelaporan kejahatan kebencian***

60. Jika ada kendala dalam melaporkan kejahatan kebencian, mengubah model hukum mungkin bukanlah cara terbaik untuk mengatasinya. Opsi lain dapat meliputi:

- kampanye kesadaran publik;
- memperkenalkan cara-cara pelaporan alternatif, seperti layanan berbasis komunitas yang dapat melaporkan kejahatan kebencian atas nama korban dan orang lain.

### *Menuntut kejahatan kebencian*

61. Jika motif kebencian tidak secara konsisten diangkat oleh jaksa penuntut pada saat menjatuhkan hukuman, beberapa opsi untuk mengatasi hal ini dapat berupa:

- Memberikan nasihat kepada pengacara Pemerintah mengenai penuntutan kejahatan kebencian, serupa dengan panduan yang telah diberikan kepada jaksa penuntut Kepolisian.
- Menandai kasus kejahatan kebencian dalam sistem pengadilan. Jaksa penuntut dapat diminta untuk menyatakan apakah dakwaan terhadap seorang terdakwa merupakan kejahatan kebencian. Suatu tanda dapat mendorong hakim untuk mempertimbangkan motif kebencian pada saat menjatuhkan hukuman dan saat-saat lain yang relevan (seperti ketika memutuskan apakah akan memberikan jaminan kepada terdakwa).

### *Meningkatkan informasi tentang hasil penuntutan kejahatan kebencian*

62. Jika kasus kejahatan kebencian ditandai dalam sistem pengadilan (seperti yang dibahas di atas), pengadilan mungkin dapat berbagi informasi tentang kasus-kasus tersebut dengan Polisi. Hal ini dapat membantu Kepolisian melacak seberapa sering jaksa penuntut mengajukan motif kebencian pada saat menjatuhkan hukuman dan hasil dari penuntutan kejahatan kebencian.

### *Menerapkan faktor yang memberatkan kejahatan kebencian*

63. Jika terdapat kekhawatiran mengenai penerapan faktor pemberat kejahatan kebencian, hal tersebut mungkin dapat diatasi dengan mengubah rumusan faktor tersebut. Misalnya:

- Jika ada kekhawatiran bahwa faktor pemberat dapat diterapkan meskipun kebencian hanya merupakan alasan kecil dari delik, faktor tersebut dapat diubah sehingga kebencian harus menjadi bagian penting dari motif pelaku.

- Jika ada kekhawatiran mengenai karakteristik apa saja yang dilindungi oleh faktor pemberat, faktor tersebut dapat diubah agar hanya berlaku pada karakteristik yang tercantum, bukan pada "karakteristik umum yang melekat". Opsi lain adalah mengubah daftar contoh karakteristik yang dilindungi.
- Jika terdapat masalah di mana faktor pemberat hanya berlaku ketika pelaku percaya bahwa korban memiliki karakteristik yang dilindungi, persyaratan ini dapat dihapus.

### *Rehabilitasi pelaku kejahatan kebencian*

64. Jika terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi pelaku, tanda kejahatan kebencian yang diperkenalkan dalam sistem pengadilan dapat dibagikan dengan pihak Departemen Pemasyarakatan. Departemen Pemasyarakatan kemudian akan diberi tahu tentang vonis atas kejahatan kebencian.

**Pertanyaan 6: Jika ada masalah dengan cara kerja hukum kejahatan kebencian di Selandia Baru, dapatkah masalah tersebut diatasi dengan tetap mempertahankan model hukum yang ada saat ini (pemberatan hukuman)? Jika ya, bagaimana caranya?**

### **MODEL HUKUM LAINNYA UNTUK MENANGANI KEJAHATAN KEBENCIAN (BAB 8)**

65. Jika terdapat kendala pada model pemberatan hukuman yang tidak dapat diatasi dengan mudah, kami dapat mengusulkan perubahan kerangka hukum. Kami tertarik untuk mendapatkan masukan mengenai dua model hukum lain yang digunakan untuk menangani kejahatan kebencian di luar negeri (yang dapat diadopsi secara mandiri atau dengan disertai pemberatan hukuman):
- delik kejahatan kebencian spesifik (direkomendasikan oleh Royal Commission); dan
  - model hibrida Skotlandia, yang menggabungkan aspek-aspek pemberatan hukuman dan delik spesifik.

## Delik kejahatan kebencian spesifik

66. Dalam model ini, motif kebencian merupakan bagian dari delik yang dituduhkan kepada seseorang. Hal ini harus dibuktikan di persidangan tanpa keraguan yang beralasan (kecuali jika terdakwa mengaku bersalah). Jika terdakwa divonis bersalah, maka harus jelas dari catatan hukuman pengadilan dan laporan media bahwa delik yang dilakukan adalah kejahatan kebencian, karena motif kebencian adalah bagian dari delik. Motif kebencian juga tercatat dalam catatan kriminal pelaku.

### *Delik apa saja yang harus dicakup?*

67. Delik kejahatan kebencian biasanya didasarkan pada delik yang sudah ada (seperti penyerangan). Delik yang sudah ada ini disebut 'delik dasar'. Delik kejahatan kebencian sama dengan delik dasar kecuali jaksa juga harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki motif kebencian. Delik kejahatan kebencian memiliki hukuman maksimum yang lebih tinggi daripada delik dasar.
68. Delik harus cukup spesifik, sehingga jelas bagi publik perilaku apa yang tidak diperbolehkan. Setiap delik juga harus memiliki hukuman maksimumnya sendiri. Oleh karenanya, delik kejahatan kebencian hanya mencakup sejumlah delik dasar dan karakteristik yang dilindungi.
69. Jika kami merekomendasikan untuk memperkenalkan delik kejahatan kebencian spesifik, kami perlu mempertimbangkan untuk pelanggaran apa saja delik tersebut berlaku. Beberapa hal yang mungkin perlu kami pikirkan adalah:
- seberapa sering delik dasar didorong oleh motif kebencian; dan
  - apakah hukuman maksimum untuk delik dasar sudah cukup tinggi untuk menghukum kejahatan kebencian.
70. Royal Commission merekomendasikan adanya delik kejahatan kebencian untuk perilaku atau bahasa yang menyinggung, perusakan yang disengaja, intimidasi, penyerangan, pembakaran, dan perusakan yang disengaja. Namun, hal ini tidak akan mencakup semua kejahatan kebencian. Misalnya, di Aotearoa Selandia Baru, perampokan dan penggunaan atau kepemilikan bahan peledak telah menjadi kejahatan kebencian.

**Pertanyaan 7: Jika delik kejahatan kebencian spesifik diadopsi, tindak pidana apa saja yang harus dicakup? Mengapa?**

*Keunggulan dan kelemahan*

71. Delik kejahatan kebencian spesifik mungkin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan model pemberatan hukuman. Misalnya, delik tersebut mungkin:
- mengandung pesan yang lebih kuat bahwa kejahatan kebencian adalah hal yang serius;
  - memperbaiki pencatatan dan pemantauan kejahatan kebencian;
  - berarti lebih banyak pelanggaran yang diselidiki dan dituntut sebagai kejahatan kebencian;
  - mengubah pandangan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kebencian;
  - lebih adil bagi terdakwa, karena motif kebencian harus dibuktikan di persidangan tanpa keraguan (kecuali jika terdakwa mengaku bersalah).
72. Delik kejahatan kebencian spesifik mungkin juga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya:
- Delik tersebut tidak mencakup semua kejahatan kebencian. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa hal ini tidak adil.
  - Hal ini dapat membuat persidangan pidana menjadi lebih lama, lebih rumit, dan lebih mahal. Terdakwa juga cenderung tidak mengaku bersalah. Jaksa penuntut perlu membuktikan adanya motif kebencian di persidangan, yang mungkin melibatkan lebih banyak bukti dari para korban dan saksi lainnya.
  - Motif kebencian mungkin tidak kentara dalam beberapa kasus. Misalnya, jaksa penuntut dapat mendakwa seseorang dengan delik dasar dan bukan delik kejahatan kebencian karena terdakwa akan mengaku bersalah atas delik dasar.

- Motif kebencian akan diperlakukan lebih serius daripada faktor yang memberatkan hukuman lainnya (seperti kekejaman serius atau kerentanan korban).
- Menghukum pelaku dengan lebih berat berdasarkan motif mereka dapat melanggar hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Menyelidiki pendapat dan keyakinan tersangka juga dapat menimbulkan efek mengerikan terhadap kebebasan ekspresi.
- Delik kejahatan kebencian dapat ditegakkan secara tidak proporsional terhadap kelompok minoritas dan kelompok sosial-ekonomi yang lebih rendah (terutama Māori, yang terwakili secara berlebihan dalam sistem peradilan pidana, termasuk sebagai tersangka pelaku kejahatan kebencian).

### Model hibrida Skotlandia

73. Di bawah model ini, delik apa pun dapat diidentifikasi sebagai 'diperberat kebencian' Jaksa penuntut harus menyatakan bahwa delik tersebut merupakan delik yang diperberat kebencian ketika terdakwa didakwa dan pemberatan tersebut harus dibuktikan di persidangan (kecuali jika terdakwa mengaku bersalah). Motif kebencian diperhitungkan ketika pelaku dijatuhi hukuman, tetapi hukuman maksimum untuk delik tersebut tidak berubah. Vonis menunjukkan bahwa delik tersebut merupakan kejahatan kebencian.
74. Seperti model delik spesifik, model hibrida Skotlandia hanya berlaku untuk karakteristik yang dilindungi secara spesifik.
75. Model hibrida Skotlandia memiliki keunggulan dan kelemahan yang serupa dengan delik spesifik. Perbedaan utamanya adalah model ini:

- tidak meningkatkan hukuman maksimum untuk kejahatan kebencian (sehingga delik spesifik mungkin lebih baik dalam menunjukkan bahwa kejahatan kebencian bersifat serius);
- mencakup lebih banyak kejahatan kebencian, karena berlaku untuk setiap delik;
- lebih sederhana, karena tidak menciptakan banyak delik kejahatan kebencian yang terpisah.

76. Model hibrida Skotlandia mungkin dikritik karena mungkin tidak ada gunanya mewajibkan jaksa penuntut untuk membuktikan motif kebencian di persidangan, karena hukuman maksimum untuk delik yang diperberat oleh kebencian sama dengan yang tidak diperberat.

**Pertanyaan 8: Haruskah model hukum yang berbeda, seperti delik kejahatan kebencian spesifik atau model hibrida Skotlandia, diperkenalkan di Aotearoa Selandia Baru? Mengapa atau mengapa tidak?**

**Haruskah model pemberatan hukuman dipertahankan jika model hukum yang baru diadopsi?**

77. Baik model delik spesifik maupun model hibrida Skotlandia dapat digunakan dengan model pemberatan hukuman. Jika model hukum baru diadopsi, kami tertarik untuk mengetahui apakah model pemberatan hukuman yang ada saat ini juga harus dipertahankan.
78. Manfaat menggunakan model baru dengan model pemberatan hukuman adalah:
- manfaat dari delik spesifik atau model hibrida Skotlandia akan tetap berlaku; dan
  - pemberatan hukuman akan mencakup kejahatan kebencian yang tidak tercakup dalam model yang baru.
79. Kelemahan utama dari penggunaan model baru dengan model pemberatan hukuman adalah bahwa hal itu akan membuat hukum menjadi lebih kompleks. Perlu ada aturan tentang kapan pemberatan hukuman diberlakukan. Misalnya, apakah hal ini akan berlaku jika jaksa penuntut dapat mendakwa terdakwa

dengan delik kejahatan kebencian spesifik namun memilih untuk tidak melakukannya?

**Pertanyaan 9: Jika delik kejahatan kebencian spesifik atau model hibrida Skotlandia diperkenalkan, haruskah model pemberatan hukuman juga dipertahankan?**